

MEKANISME PENDANAAN DEBT FOR NATURE SWAP UNTUK MENDUKUNG PELESTARIAN ALAM INDONESIA

Masyithah Aulia Adhiem*

Abstrak

Kerusakan alam di Indonesia masih terus terjadi, baik karena ulah manusia maupun akibat perubahan iklim yang semakin parah. Untuk mengatasinya dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan melihat penggunaan mekanisme debt for nature swap (DNS) sebagai alternatif pembiayaan dan mengkaji upaya peningkatan efektivitasnya. Mekanisme DNS merupakan pertukaran utang menjadi pembiayaan proyek berbasis lingkungan. DNS dapat memberikan keuntungan yaitu menghapus sebagian utang negara dan sekaligus memberikan akses pembiayaan dari internasional. Guna meningkatkan efektivitasnya, dapat dilakukan dukungan kebijakan yaitu pembangunan peta jalan pelestarian alam, peningkatan akurasi penghitungan kebutuhan pendanaan, mendorong kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat. Komisi IV DPR RI dapat mendorong mitra kerja terkait untuk membangun rencana kegiatan yang dapat diajukan menjadi proyek. Komisi XI DPR RI juga dapat mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan penghitungan kembali atas utang negara yang dapat diajukan untuk diputihkan.

Pendahuluan

Kelestarian alam semakin terancam akibat berbagai kegiatan manusia dan perubahan iklim yang terus terjadi. Degradasi ekosistem menyebabkan banyak satwa kehilangan habitat alamnya. Contoh, kasus orangutan yang masuk ke pemukiman warga atau lokasi tambang yang disinyalir terjadi karena ruang hidupnya semakin

menyempit akibat kerusakan ekosistem hutan dan alih fungsi lahan (Sucipto, 2024). Alih fungsi lahan juga berimbas pada kerusakan ekosistem mangrove, seperti yang terjadi di pesisir timur Sumatera. Sebanyak 6.302 hektar dari total 225.376 hektar lahan mangrove di Provinsi Riau terancam rusak akibat alih fungsi lahan (“Alih Fungsi Lahan Ancam Mangrove Riau”, 2024).



Sinyal perubahan iklim jangka panjang mulai terlihat dari semakin sulitnya memprediksi pola cuaca (“Sinyal Perubahan Iklim dari Hujan Bulan Juli”, 2024).

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi ancaman pelestarian alam. Guna memastikan efektivitasnya diperlukan kerja sama multipihak dan multisektoral, salah satunya melalui aspek pendanaan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu mekanisme adalah *debt for nature swap* atau pertukaran utang negara menjadi pembiayaan program yang terkait dengan pelestarian alam. Pemerintah Indonesia dan Amerika telah melakukan penandatanganan perjanjian pertukaran utang untuk membiayai konservasi terumbu karang pada awal Juli 2024 (“Utang RI Ditukar Proyek Konservasi”, 2024). Tulisan ini memberikan gambaran mekanisme pendanaan internasional melalui konversi utang terhadap pelaksanaan kebijakan terkait alam hidup di Indonesia, dan mengkaji upaya yang harus dilakukan untuk memastikan pendanaan tersebut dapat diakses secara berkelanjutan.

Mekanisme Pendanaan Alam Hidup Bersumber dari Konversi Utang Negara (*Debt for Nature Swap*)

Indonesia tidak dapat bergantung sepenuhnya pada pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi masalah alam dan dampak perubahan iklim yang terjadi. Salah satu alternatif pembiayaan yang baru saja dilakukan oleh Indonesia adalah pertukaran utang atau yang dikenal dengan *debt for nature swap*. *Debt for nature swap* merupakan salah satu mekanisme

pendanaan internasional untuk kegiatan konservasi atau pelestarian alam lainnya yang dananya bersumber dari pemutihan utang dari negara-negara peminjam oleh negara donor dengan menukar kewajiban pembayaran utang dengan komitmen debitur untuk membiayai kegiatan atau proyek konservasi (FAO, n.d.). Mekanisme ini umum dilakukan oleh negara-negara berkembang yang memiliki kebutuhan finansial yang tinggi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, kegiatan konservasi, dan kegiatan pelestarian alam lainnya. Contoh penggunaan mekanisme ini dilakukan oleh Ekuador pada tahun 2023 lalu yang memutihkan sebagian utangnya menjadi pembiayaan perlindungan hutan hujan di Amazon dan area sepanjang pantai Pasifik yang termasuk area dilindungi (WEF, 2024).

Untuk mengalihkan utang negara melalui pendanaan kegiatan konservasi, negara kreditur memerlukan pihak ketiga yang dapat dipercaya yaitu lembaga konservasi atau aktivis alam internasional yang bersedia mengambil alih pengelolaan utang tersebut, dan berunding dengan negara kreditur (Afrizal & Nurrinawati, 2014). Pada 3 Juli 2024, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian konversi utang senilai US\$35 juta atau setara dengan Rp568,9 miliar untuk periode sembilan tahun. Kewajiban utang tersebut dialihkan untuk membiayai proyek konservasi terumbu karang yang harus dilakukan per akhir tahun 2024 oleh Indonesia (“Utang RI Ditukar Proyek Konservasi”,

2024). Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI), The Nature Conservancy, dan Yayasan Conservation International (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2024).

Pelaksanaan dan pengelolaan proyek terumbu karang akan dilakukan bekerja sama dengan organisasi masyarakat Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) sebagai organisasi yang bergerak di bidang konservasi ekosistem kelautan dan kehutanan ("Utang RI Ditukar Proyek Konservasi", 2024). Adapun pengawasan dalam pelaksanaan proyek dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, mitra pertukaran organisasi nirlaba atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat sipil lainnya (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2024).

Debt for nature swap memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia tidak sekedar sebagai instrumen pengurangan utang, karena jika dilihat dari nominalnya, jumlah utang yang dapat ditukar umumnya tidak terlalu besar. Namun demikian, manfaat *debt for nature swap* bagi Indonesia adalah penyediaan alternatif pendanaan untuk berbagai permasalahan pelestarian alam yang terjadi saat ini (Oktaviani, et al., 2018). Mekanisme pendanaan selain membantu negara

debitur, juga memberikan keuntungan tersendiri bagi negara kreditur. Negara kreditur mungkin tidak mendapatkan keuntungan finansial, namun keuntungan lebih kepada pemenuhan tanggung jawab global dan peningkatan citra negara. Dengan berpartisipasi dalam *debt-for-nature swap*, negara kreditur menunjukkan komitmen terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga dapat meningkatkan citra negara di mata dunia internasional dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara debitur.

Upaya Peningkatan Efektivitas Mekanisme *Debt for Nature Swap*

Mekanisme finansial *debt for nature swap* berdampak positif bagi pengurangan utang negara sekaligus menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaksanaan aksi pelestarian alam, konservasi, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, pelaksanaannya bukan berarti tanpa risiko, beberapa di antaranya adalah: potensi kerugian finansial karena nilai utang yang dihapuskan lebih rendah dari nilai aset alam yang akan dilindungi (Cassimon, et al., 2011). Selain itu juga terdapat risiko *moral hazard* yang menganggap bahwa pengajuan utang menjadi seakan-akan digampangkan dengan asumsi nantinya dapat diputihkan melalui pengajuan proyek kegiatan berbasis pelestarian alam. Penyelewengan dana menjadi salah satu tantangan dalam mengimplementasikannya.

Mekanisme ini juga menyaratkan adanya proses negosiasi antara negara donor dengan debitur. Proses negosiasi umumnya memakan waktu cukup lama dan memakan biaya tinggi dalam menentukan berbagai hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi (Oktaviani, *et al.*, 2018). Berbagai syarat yang diajukan dapat saja tidak sejalan dengan kebijakan nasional atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan proyek yang didanai juga membutuhkan komitmen yang tinggi dari negara debitor, dalam hal ini mencakup pemerintah dan mitra kerja organisasi masyarakat. Risiko juga dapat terjadi di tingkat masyarakat akibat penolakan atas proyek yang akan dijalankan.

Guna meningkatkan efektivitas mekanisme pembiayaan ini, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, pemerintah beserta mitra dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama dalam membuat peta jalan pengelolaan pelestarian alam di Indonesia yang meliputi, di antaranya, upaya konservasi dan juga rencana aksi mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk menguatkan urgensi kebutuhan pendanaan proyek saat proses negosiasi pertukaran utang dengan negara donor. Negosiasi merupakan salah satu tahapan dalam proses pengajuan *debt for nature swap* (FAO, n.d).

Kedua, perlu adanya upaya penghitungan kebutuhan pendanaan yang komprehensif menggunakan basis data dari berbagai kementerian/lembaga atau organisasi lainnya sehingga memberikan gambaran kerangka kebutuhan pendanaan untuk jangka waktu panjang dan menengah. Hal ini akan membantu pemerintah untuk menentukan prioritas pendanaan. *Ketiga*, mendorong kerja sama, kolaborasi dan sinergi antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan pihak yang dapat secara langsung bertindak sebagai pelaksana berbagai kebijakan alam. Untuk itu pemerintah daerah perlu didorong untuk aktif merancang kegiatan yang berorientasi pada pelestarian alam yang juga mengedepankan upaya penanganan dampak perubahan iklim. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi proyek yang didanai oleh dana dari mekanisme *debt for nature swap*.

Keempat, terus membina kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang alam. Salah satu prasyarat dalam mengajukan *debt for nature swap* adalah telah adanya kerja sama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat (FAO, n.d). Organisasi tersebut merupakan mitra kerja pemerintah dalam mengelola proyek berbasis pelestarian alam. *Kelima*, mendorong partisipasi masyarakat dan semua pihak, baik dengan berperan aktif dalam proyek maupun dalam melakukan pengawasan.

Penutup

Guna mengatasi tantangan pelestarian alam Indonesia dibutuhkan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan, salah satunya melalui mekanisme *debt for nature swap*, yaitu konversi utang menjadi pembiayaan proyek kegiatan berbasis alam. Namun tetap diperlukan adanya kebijakan pendukung untuk meningkatkan efektivitas pendanaan yaitu *pertama*, membangun peta jalan pengelolaan alam hidup. *Kedua*, penghitungan kebutuhan dana yang akurat, *ketiga*, membangun kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, *keempat*, memperkuat kerja sama

dengan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang alam, dan *kelima* mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Komisi IV DPR RI dapat meminta mitranya untuk mempersiapkan berbagai proyek pelestarian alam dan keanekaragaman hayati yang berprospek didanai oleh mekanisme *debt for nature swap*. Komisi XI DPR RI juga dapat mendorong Kementerian Keuangan untuk menghitung kembali utang negara yang dapat diajukan untuk diputihkan dan dialihkan menjadi pembiayaan kegiatan berorientasi alam.

Referensi

- Afrizal & Nurrinawati. (2014). Kepentingan Amerika Serikat dalam Program Debt For Nature Swaps (DNS) di Indonesia Tahun 2009-2013. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 1, no. 2, Oct. 2014.
- Alih fungsi lahanancam mangrove Riau. (2024, Juli 10). *Kompas*, 11.
- Cassimon, D., Prowse, M., & Essers, D. (2011). The pitfalls and potential of debt-for-nature swaps: A US-Indonesian case study. *Elsevier BV*, 21(1), 93-102. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.10.001>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (n.d.). Debt-for-nature swaps: a decade of experience and new directions for the future. <https://www.fao.org/4/w3247e/w3247e06.htm>.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2024, 09 Juli). Amerika Serikat dan Indonesia tandatangani pengalihan utang untuk lindungi ekosistem terumbu karang. <https://id.usembassy.gov/id/siaran-pers-pengalihan-utang-untuk-perlindungan-alam/>.
- Oktaviani, Y., et al. (2018, January 01). Financial solutions for biodiversity in contributing to the economic development in Indonesia. *EDP Sciences*, 74, 01007-01007. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187401007>.
- Sinyal perubahan iklim dari hujan bulan Juli. (2024, Juli 11). *Kompas*, 8.
- Sucipto. (2024, Juli 11). Habitat orang utan rusak, manusia turut terancam. *Kompas*, 11.
- Utang RI ditukar proyek konservasi. (2024, Juli 11). *Kompas*, 9.
- World Economic Forum (WEF). (2024, April 26). Climate finance: What are debt-for-nature swaps and how can they help countries? <https://www.weforum.org/agenda/2024/04/climate-finance-debt-nature-swap/>

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.